

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

# Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi

Sejumlah kalangan menyarankan agar anggaran penataan 21 kampung itu tetap berada di dinas terkait.

## Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

**JAKARTA** – Rencana pemerintah DKI Jakarta menggelontorkan dana swakelola penataan 21 kampung langsung kepada masyarakat menuai kritik karena dinilai rentan diselewengkan dan mendatangkan masalah kelak di kemudian hari.

“Jangan sampai masyarakat menjadi korban dana swakelola,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI, Gembong Warsono, kepada *Tempo* kemarin.

Gembong menerangkan, program dana swakelola yang diserahkan kepada masyarakat untuk menggarap proyek fisik rawan disalahgunakan, bahkan bisa mengarah ke kasus korupsi. Dia mencontohkan kasus korupsi dalam kegiatan swakelola di Suku Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Air Jakarta Utara pada 2013-2014. Proyeknya berupa refungsionalisasi sungai dan waduk, pengerukan, perbaikan saluran penghubung, serta pemeliharaan infrastruktur drainase saluran mikro dan submikro.

Kasus korupsi itu menyeret tiga bekas Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara menjadi tersangka pada 2017. Mereka diduga menyelewengkan anggaran swakelola dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan APBD Perubahan 2013-2014 sebesar Rp 116,3 miliar.

Gembong pun menilai rencana Gubernur Anies memberikan dana swakelola penataan kampung kepada masyarakat pada tahun ini tersebut tidak disertai perencanaan yang matang. Dia menduga Anies menyampaikan rencana itu hanya untuk menjawab kritik Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyebut Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, seperti Singapura, sedangkan daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara, seperti Bangladesh.

Gembong menanggapi pernyataan Gubernur Anies Baswedan pada Jumat pekan lalu bahwa DKI bakal memberikan dana swakelola kepada masyarakat dalam program penataan 21 kampung. Proyek tersebut akan dilakukan melalui perencanaan sesuai dengan program *community action plan* (CAP) dan pelaksanaannya

dengan skema *collaborative implementation program* (CIP).

Menurut Anies, dasar kegiatan itu ialah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 47 aturan itu menyebutkan ada empat tipe swakelola. Pelaksanaan swakelola tipe empat dilakukan berdasarkan kontrak pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan pimpinan kelompok masyarakat. “Swakelola tipe empat bisa diberikan kepada masyarakat,” ujarnya saat itu.

Adapun anggota Komisi Bidang Keuangan DPRD DKI, Ruslan Amsyari, mempertanyakan detail mekanisme pertanggungjawaban dana swakelola penataan kampung. Menurut Ruslan, anggaran penataan kampung sebaiknya tetap pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terkait untuk mempermudah pengawasan dan pertanggungjawaban.

Politikus Partai Hanura tersebut menyarankan agar proyek itu dikerjakan oleh dinas. Apalagi, dia melanjutkan, anggaran swakelola belum ada dalam APBD 2019. “Jangan sampai kasih kesempatan oknum untuk

mengkorupsi dana itu.”

Peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Gunardi Ridwan, pun mempersoalkan pengawasan dalam penggunaan dana swakelola penataan 21 kampung jika diserahkan kepada masyarakat berikut penggarapannya.

Dia memastikan masyarakat penerima dana akan kesulitan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut. Namun, jika rencana itu tetap akan diwujudkan, Gunardi berpendapat pemerintah DKI harus transparan dalam pendataan penerima dana swakelola dari proses pendaftaran hingga keputusan mereka terpilih.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, pun memberi saran kepada Anies agar dana swakelola tetap berada di dinas terkait. Sedangkan masyarakat bisa dilibatkan dalam pengerjaan penataan kampung tersebut.

Menanggapi kekhawatiran dalam prosesnya, Gubernur Anies memastikan penggunaan dana swakelola akan tetap disertai laporan pertanggungjawaban dan telah dite-

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

# Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi

tapkan mekanismenya. "Memangnya kalau swasta (yang mengerjakan), enggak bocor gitu?" ucapnya, tanpa merinci mekanisme pertanggungjawaban itu.

Sekretaris Jenderal Anak Kali Ciliwung, Salijan, menyatakan Kampung Lodan, Kerapu, dan Tongkol akan mengikuti

program penataan 21 kampung. Dia bahkan optimistis warga tiga kampung yang berada di tepi anak Kali Ciliwung tersebut mampu membuat laporan pertanggungjawaban dana swakelola. "Kami akan saling mengontrol," ujar Salijan.

● LANI DIANA

## Dijanji Sejak Kampanye

**G**UBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan akan menyelenggarakan program penataan kampung dengan revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Zonasi. Saat ini, dari 21 kampung yang akan ditata, sembilan kampung masih berada di luar zona permukiman.

Revisi peraturan daerah itu telah masuk dalam program pembentukan peraturan daerah pada tahun ini. "Kita punya kecenderungan mengatur peta di ruang tertutup karena tidak lihat ke lapangan," ujar Anies, Jumat lalu.

Program penataan kampung itu merupakan janji politik Anies ketika berkampanye dalam pemilihan Gubernur DKI 2017.

"Kami memang pernah teken kontrak politik," kata Sekretaris Jenderal Anak Kali Ciliwung, Salijan.

Kontrak politik yang diteken oleh Anies pada 8 April 2017 itu berisi beberapa poin, seperti perubahan tata ruang untuk perkampungan, legalisasi perkampungan, hingga perizinan usaha bagi pedagang kaki lima.

Berikut ini 21 kampung yang akan ditata berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 878 Tahun 2018 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat:

No.	Nama Kampung	Kelurahan	Kota
1	Lodan	Ancol	Jakarta Utara
2	Tongkol	Ancol	Jakarta Utara
3	Kerapu	Ancol	Jakarta Utara
4	Muka	Ancol	Jakarta Utara
5	Walang	Ancol	Jakarta Utara
6	Akuarium	Penjaringan	Jakarta Utara
7	Marlina	Penjaringan	Jakarta Utara
8	Elektro	Penjaringan	Jakarta Utara
9	Gedong Pompa	Penjaringan	Jakarta Utara
10	Blok Empang	Pluit	Jakarta Utara
11	Kerang Ijo	Pluit	Jakarta Utara
12	Baru Tembok Bolong	Pluit	Jakarta Utara
13	Tanah Merah	Rawa Badak Selatan	Jakarta Utara
14	Prumpung	Cipinang Besar Utara	Jakarta Timur
15	Rawa Barat	Kebon Jeruk	Jakarta Barat
16	Rawa Timur	Kebon Jeruk	Jakarta Barat
17	Guji Baru	Duri Kepa	Jakarta Barat
18	Kunir	Pinangisia	Jakarta Barat
19	Kali Apuran	Kedaung Kali Angke	Jakarta Barat
20	Sekretaris	Tanjung Duren Utara	Jakarta Barat
21	Baru	Pondok Pinang	Jakarta Selatan

Sumber: wawancara riset